

# I. PENDAHULUAN

## I.I Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut khususnya bangsa Indonesia. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakanlah asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut

maka di negara kita ada pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan yang bersifat otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pamerintah Daerah). Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Pajak reklame dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sumber penerimaan daerah pajak

reklame dan pajak hiburan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggah utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian, akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat ijin sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu juga, kota Bekasi sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan sertaditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk

mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling, rekreasi air, pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi guna memenuhi pembangunan, oleh karena itu dalam skripsi ini penulis ingin kaji **“Pengaruh Pajak Reklame dan pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Upaya Penggalan Potensi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2006 - 2011”**.

## 1.2 Identifikasi masalah

Tujuan dilakukannya identifikasi masalah adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis masalah tentang: bagaimana pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.? Seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli

daerah.? upaya apa yang harus dilakukan oleh Dispenda dalam penggalian potensi pendapatan daerah.

### 1.3 Batasan Masalah

Sesuai judul skripsi yang penulis buat maka penulis membatasi masalah-masalah yang ditelitinya adalah sejauh mana hubungan dari Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi periode 2006-2011 dengan menggunakan metode uji hipotesis yaitu uji parsial (uji-t). dan data yang diperoleh oleh penulis ialah laporan Pendapatan Asli Daerah Bekasi tahun 2006-2011 serta Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tahun 2006-2011, sehingga apa yang diuraikan nanti tidak akan menyimpang dari permasalahan yang diidentifikasi.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh antara pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
- b. Seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah ?
- c. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Dispenda dalam penggalian potensi pendapatan daerah ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Bekasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Potensi pajak hiburan yang dimiliki Kota Bekasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis, yaitu:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pendapatan daerah Kota Bekasi
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.